



Peran Strategis Administrator dalam Mengelola Regulasi Dan Fasilitas Investasi Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

M. Sulhan Habibi¹, Nining Purwati², M. Firdaus³

^{*1,2,3}Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

e-Mail: soulhahnmail@gmail.com

Abstrak : Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi berbasis pariwisata. Dalam penyelenggaraannya, Administrator KEK memiliki peran strategis sebagai fasilitator, regulator teknis, dan koordinator lintas lembaga. Namun, sebelum 2023, penyelenggaraan KEK Mandalika masih menghadapi kendala berupa tumpang tindih regulasi, ketidakpastian insentif, keterbatasan fasilitas pelayanan, serta lemahnya koordinasi antar instansi, sehingga berdampak pada lambatnya realisasi investasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis Administrator dalam pengelolaan regulasi dan fasilitas investasi serta dampaknya terhadap perkembangan investasi di KEK Mandalika. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Administrator setelah 2023 memperkuat implementasi kebijakan KEK, mempercepat pelayanan perizinan, meningkatkan kepastian regulasi, serta mendorong kenaikan minat dan realisasi investasi. Meski demikian, tantangan tetap muncul seperti keterbatasan sumber daya, isu penguasaan lahan, dan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan harmonisasi regulasi diperlukan untuk mendukung peningkatan kinerja investasi KEK Mandalika secara berkelanjutan.

Kata Kunci: KEK Mandalika, Administrator, Peran Strategis, Regulasi, Investasi

PENDAHULUAN

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang berlokasi di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor pariwisata dan investasi (Sukuryadi *et al.*, 2025). Pembentukan KEK Mandalika memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Sejak diresmikan sebagai KEK pada tahun 2017, kawasan ini menunjukkan perkembangan yang pesat dan mendapatkan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat internasional. Dengan daya tarik alam dan budaya yang khas (Sukuryadi *et al.*, 2025), Mandalika diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Secara kelembagaan, penyelenggaraan KEK Mandalika berada di bawah pengelolaan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), yaitu badan usaha yang ditunjuk sebagai penyelenggara kegiatan usaha KEK (Presiden Republik Indonesia, 2014). ITDC memegang peran strategis dalam memastikan keberlanjutan pengembangan kawasan melalui penyediaan infrastruktur dasar, pengelolaan tata ruang, pengembangan sarana pendukung pariwisata, serta penyusunan strategi promosi investasi.

Lebih jauh, ITDC juga menjadi pihak yang berperan menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, antara lain melalui penyediaan lahan investasi, pemenuhan standar infrastruktur, serta difasilitasi prosedur perizinan yang lebih efisien bagi investor domestik maupun asing. Dengan demikian, keberhasilan pengembangan KEK Mandalika tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya alamnya, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola kelembagaan di dalamnya.

Investasi merupakan elemen fundamental bagi percepatan pengembangan KEK (Ferli *et al.*, 2024). Peningkatan realisasi investasi akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi kawasan, penciptaan efek berganda (*multiplier effect*), serta peningkatan pendapatan masyarakat. Terlebih sejak beroperasinya sirkuit Mandalika sebagai tuan rumah berbagai Event olahraga nasional dan internasional, minat investor menunjukkan peningkatan yang signifikan, sehingga diharapkan kawasan ini mampu menarik investasi berskala besar dan berkelanjutan. Namun demikian, realisasi investasi di KEK tidak terjadi secara otomatis. Diperlukan tata kelola administrasi yang efektif, terkoordinasi, dan responsif terhadap kebutuhan investor.

Dalam konteks tersebut, peran administrator KEK menjadi sangat krusial. Administrator bertindak sebagai penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, ITDC selaku pengelola kawasan, serta para investor. Administrator juga bertanggung jawab

atas pengelolaan regulasi dan prosedur perizinan, penyediaan fasilitas penunjang investasi, serta menciptakan kepastian hukum dan kemudahan berusaha di dalam kawasan. Pada saat awal pembentukan KEK Mandalika, posisi Administrator KEK dipegang oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah (Bupati Lombok Tengah, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan administrator bukan sekadar fungsi administratif, tetapi menjadi simpul koordinasi utama dalam penyelenggaraan investasi.

Permasalahan utama yang muncul adalah bahwa efektivitas penyelenggaraan KEK tidak semata-mata ditentukan oleh kebijakan pusat atau potensi geografis kawasan, tetapi sangat bergantung pada kinerja administrator dalam mengelola regulasi, mengurangi hambatan birokrasi, serta menyediakan fasilitas investasi yang kompetitif. Tantangan yang sering muncul antara lain keberagaman aturan lintas sektor, tumpang tindih kewenangan, keterbatasan kualitas pelayanan, serta ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah. Kondisi ini berpotensi menurunkan minat investor, memperlambat realisasi investasi, dan mengurangi efektivitas KEK sebagai instrumen percepatan pembangunan ekonomi.

Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti KEK dari perspektif makro, seperti kontribusi ekonomi, analisis dampak investasi, atau potensi pariwisata Kawasan (Sukuryadi *et al.*, 2025). Namun kajian yang secara spesifik

membahas peran strategis administrator dalam mengelola regulasi dan fasilitas investasi di tingkat operasional masih relatif terbatas, terutama pada konteks KEK pariwisata seperti Mandalika. Padahal, administrator merupakan aktor kunci yang menjembatani kepentingan investor dengan kerangka regulasi pemerintah (Angkat *et al.*, 2025; Magdalena *et al.*, 2023; Rizkiyah & Azzatillah, 2023; Yuliani, 2017). Research gap inilah yang menjadi ruang kontribusi penelitian ini.

Penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam bagaimana peran administrator KEK Mandalika dalam mengelola regulasi dan fasilitas investasi, serta sejauh mana peran tersebut mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi kendala kelembagaan yang dihadapi administrator, serta implikasinya terhadap proses pengambilan keputusan investasi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi administrator KEK sebagai aktor strategis dalam tata kelola investasi kawasan, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat efektivitas penyelenggaraan KEK Mandalika sebagai instrumen percepatan pembangunan ekonomi nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami secara mendalam peran strategis administrator dalam

pengelolaan regulasi dan fasilitasi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dalam konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan yang melingkupinya. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam semi-terstruktur dengan administrator KEK, pihak ITDC, serta investor, dan studi dokumentasi terhadap regulasi, laporan resmi, serta data investasi. Penelitian dilaksanakan selama satu bulan di KEK Mandalika dan Kantor Administrator KEK Lombok Tengah. Data yang diperoleh dianalisis secara interaktif dan berkelanjutan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan dengan pendekatan analisis tematik. Keabsahan data dijamin melalui penerapan kriteria *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* dengan teknik triangulasi, Member check, audit trail, serta penggunaan kutipan langsung. Seluruh proses penelitian dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika penelitian sosial, termasuk persetujuan informan, kerahasiaan data, serta transparansi dan kejujuran akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dianalisis secara sistematis dengan mengacu pada rumusan masalah dan kerangka teori yang telah dikemukakan, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan regulasi dan fasilitasi

investasi oleh Administrator KEK Mandalika serta implikasinya terhadap perkembangan investasi di kawasan tersebut.

1. Peran Strategis Administrator dalam Mengelola Regulasi dan Fasilitas Investasi di KEK Mandalika

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Administrator KEK Mandalika menjalankan peran strategis yang melampaui fungsi administratif, terutama setelah pelantikan Kepala Administrator definitif pada Juni 2023. Peran strategis tersebut tampak dalam tiga dimensi utama.

Pertama, sebagai pengelola dan penerjemah regulasi, Administrator berperan menjembatani kebijakan nasional KEK dengan implementasi operasional di tingkat kawasan. Tidak hanya menjalankan regulasi secara normatif, tetapi juga melakukan interpretasi kebijakan agar selaras dengan kebutuhan investor dan kondisi lokal Mandalika. Hal ini terlihat dari upaya harmonisasi regulasi pusat dan daerah, pengurangan tumpang tindih kewenangan, serta pemberian kepastian hukum dalam proses perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS. penelitian dari (Ferza & Hamudy, 2021) menunjukkan studi desain kebijakan daerah untuk KEK Mandalika menekankan pentingnya kelembagaan administrator KEK, penyesuaian OSS khusus KEK, dan harmonisasi izin pusat yaitu daerah agar pemberian insentif dan perizinan lebih pasti dan sederhana. Sedangkan riset dari (Hutauruk *et al.*, 2023) regulasi KEK 5.0 juga menegaskan

bahwa keberhasilan KEK mensyaratkan kerangka hukum yang jelas, pro-bisnis, dan adaptif, sehingga aktor pengelola kawasan berperan menerjemahkan regulasi ke praktik investasi (Handayani *et al.*, 2023).

Kedua, sebagai fasilitator investasi, Administrator berfungsi sebagai pusat layanan satu pintu (*One stop service*) yang mengintegrasikan pelayanan perizinan, non perizinan, serta pendampingan teknis bagi investor. Penelitian menemukan bahwa Administrator aktif mempercepat proses perizinan, memberikan asistensi kepada investor dalam pemenuhan persyaratan administrasi, serta memfasilitasi akses terhadap insentif fiskal dan non fiskal KEK. Peran ini memperkuat persepsi investor terhadap kemudahan berusaha dan meningkatkan efisiensi birokrasi di KEK Mandalika. Penelitian dari (Alfian *et al.*, 2022) tentang potensi ekonomi Mandalika menyoroti perlunya strategi pemanfaatan insentif jaringan ekonomi KEK untuk mempercepat investasi di sektor pariwisata dan pendukungnya.

Ketiga, sebagai koordinator lintas lembaga, Administrator memainkan peran strategis dalam menghubungkan Dewan Nasional KEK, Dewan Kawasan, ITDC sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola, pemerintah daerah, serta instansi teknis lainnya. Koordinasi ini menjadi kunci dalam menyelesaikan hambatan investasi, memastikan konsistensi kebijakan, dan menjaga kelancaran operasional kawasan. Dengan

demikian, Administrator tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai aktor tata kelola (*governance actor*) dalam pengelolaan KEK Mandalika. Studi lain dari (Suryade *et al.*, 2021) tentang strategi kebijakan dan keberlanjutan Mandalika menegaskan bahwa skenario terbaik adalah yang mengintegrasikan investasi dengan pemberdayaan lokal, melalui koordinasi Multi-aktor (ITDC, pemerintah daerah, komunitas, lembaga pusat).

2. Dampak Peran Administrator terhadap Perkembangan Investasi di KEK Mandalika

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran strategis Administrator memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan investasi di KEK Mandalika, terutama pada periode pasca-2023.

Dari sisi kinerja kelembagaan, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrator menunjukkan peningkatan, khususnya pada aspek koordinasi penyelenggaraan KEK, indeks kepuasan layanan fasilitas dan kemudahan, serta penyelesaian perizinan dan pengawasan operasional kawasan. Hal ini menandakan bahwa peran Administrator berkontribusi langsung terhadap perbaikan tata kelola KEK (Ekwueme *et al.*, 2023; Permadi, 2017). Studi Bruhin *et al.* (2015) pengalaman Tiongkok dan Afrika menegaskan bahwa komitmen pemerintah, tata kelola kuat, dan koordinasi yang efektif adalah kunci

SEZ yang berhasil menarik investasi dan memberi kontribusi ke ekonomi lokal.

Dari sisi realisasi dan minat investasi, penelitian menemukan adanya tren peningkatan realisasi investasi dan serapan tenaga kerja di KEK Mandalika setelah Administrator menjalankan peran secara lebih aktif dan terstruktur. Kepastian regulasi, percepatan layanan, serta kejelasan prosedur menjadi faktor utama yang meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Investor menilai bahwa keberadaan Administrator memberikan kepastian proses, mengurangi risiko birokrasi, dan mempermudah komunikasi dengan pemerintah (Candra & Abdullah, 2023; Lestari *et al.*, 2025). Penelitian dari Affandi *et al.* (2024) tentang studi tata kelola Multi-level di KEK Mandalika menyoroti bahwa kurangnya koordinasi dan peran pemerintah daerah/aktor lokal menjadi hambatan bagi pengembangan sport Tourism dan pemanfaatan peluang ekonomi.

Dari sisi persepsi investor, hasil wawancara menunjukkan bahwa Administrator dipandang sebagai mitra strategis dalam proses investasi, bukan sekadar lembaga perizinan. Peran pendampingan, responsivitas terhadap kendala lapangan, serta kemampuan mengoordinasikan berbagai pihak menjadi faktor yang mendorong kelancaran investasi di KEK Mandalika. Dengan demikian, Administrator berkontribusi secara nyata dalam menciptakan iklim investasi yang lebih

kondusif dan berkelanjutan (Agil Dzikrullah & Chasanah, 2024; Shafiin *et al.*, 2023; Siregar *et al.*, 2023). Penelitian dari Masrun *et al.* (2022) Mandalika menunjukkan investasi besar di kawasan berperan sebagai katalis pertumbuhan wisata, serapan tenaga kerja, dan kenaikan pendapatan lokal sebelum pandemi.

3. Kendala dan Tantangan Administrator dalam Mengelola Regulasi dan Fasilitas Investasi di KEK Mandalika

Meskipun menunjukkan peran dan dampak positif, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala dan tantangan struktural maupun operasional yang dihadapi Administrator KEK Mandalika.

Pertama, keterbatasan sumber daya, baik dari sisi jumlah personel, kapasitas teknis, maupun dukungan anggaran. Keterbatasan ini membatasi kemampuan Administrator dalam menangani kompleksitas investasi yang terus berkembang, khususnya pada proyek-proyek berskala besar dan multistakeholder (Dharmajaya, 2018; Supraini, 2017). Studi dari Kongela *et al.* (2025) tentang fasilitas di SEZ publik Tanzania juga menemukan keterbatasan kompetensi manajer, kualitas layanan rendah, dan proses layanan lambat sebagai kendala utama yang menurunkan kepuasan investor.

Kedua, isu penguasaan dan pemanfaatan lahan, yang masih menjadi tantangan signifikan dalam pengembangan investasi. Permasalahan status lahan, proses

LUDA yang dikelola oleh ITDC, serta keterlibatan Administrator yang masih berada di tahap hilir menyebabkan kurang optimalnya peran Administrator sejak fase awal perencanaan investasi. Studi dari (Najimudin *et al.*, 2023) tentang KEK/SEZ di Indonesia dan Malaysia menyoroiti konflik agraria, ketidakpastian status lahan, dan kelemahan tata guna lahan sebagai hambatan utama investasi, serta perlunya kerangka hukum yang lebih jelas dan koordinasi sejak tahap perencanaan.

Ketiga, koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya optimal. Meskipun telah mengalami perbaikan, masih ditemukan ego sektoral dan perbedaan persepsi antar instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah (Fadilah, 2019). Hal ini berpotensi memperlambat pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan investasi. Studi dari (Kadir *et al.*, 2022) tentang tumpang tindih kewenangan di KEK Batam dan lemahnya manajemen independen di SEZ Arun Lhokseumawe juga menunjukkan bahwa dualism kewenangan dan koordinasi buruk menghambat efektivitas pengelolaan KEK

Keempat, kompleksitas regulasi dan dinamika kebijakan, terutama terkait perubahan aturan dan penyesuaian kebijakan nasional, menuntut Administrator untuk terus beradaptasi. Ketidakselarasan regulasi pada periode sebelumnya menjadi pembelajaran penting bagi penguatan peran Administrator ke depan. Studi

(Nazarov, 2025) land use SEZ di Rusia dan Malaysia juga mencatat banyaknya perubahan legislasi dan kelemahan kerangka hukum sebagai sumber ketidakpastian bagi investor dan pengelola.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Strategis Administrator dalam Mengelola Regulasi dan Fasilitas Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Administrator KEK Mandalika memegang peran strategis dalam memastikan efektivitas pengelolaan regulasi dan fasilitas investasi di tingkat operasional. Administrator tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga bertindak sebagai pelaksana utama kebijakan melalui penerjemahan regulasi pusat menjadi prosedur teknis yang jelas, penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu yang cepat dan terintegrasi, pengelolaan insentif dan fasilitas investasi, koordinasi lintas lembaga, serta pengawasan terhadap realisasi investasi. Selama tahun 2023–2024, kinerja pelayanan perizinan usaha dan non-usaha menunjukkan hasil yang baik, tercermin dari kelancaran proses perizinan dan tingginya tingkat kepuasan investor. Hal ini memperkuat bukti bahwa keberadaan Administrator memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan iklim investasi yang kondusif dan percepatan perkembangan KEK Mandalika. Namun demikian, efektivitas kinerja Administrator masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan fasilitas fisik dan administratif, ketercukupan dan kapasitas

SDM, kompleksitas koordinasi antar-lembaga dan kebijakan insentif, dinamika sosial-lingkungan terkait penataan lahan dan hubungan dengan masyarakat, peningkatan ekspektasi investor seiring berkembangnya Mandalika sebagai destinasi global, serta belum optimalnya sistem monitoring investasi akibat ketidakteraturan pelaporan oleh sebagian investor. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan Administrator menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan dan efektivitas pengembangan KEK Mandalika ke depan

DAFTAR RUJUKAN

- Affandi, R., Putri, S. N., Mursitama, T., Yani, Y., & Bainus, A. (2024). The multi-level governance dilemma in Mandalika Special Economic Zone: A bargaining and cooperation approach. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(1). <https://doi.org/10.18196/jhi.v13i1.21425>
- Alfian, A., Hadi, S., & Ismail. (2022). Mandalika Special Economic Zone and the potential for regional economic development of Central Lombok Regency through investment. *Jurnal Economic Resource*, 5(2). <https://doi.org/10.57178/jer.v5i2.371>
- Angkat, I. F. M., Ritonga, I. S., Bara, S. B. B., Raya, F. H., & Yahfizham. (2025). Pemetaan administrasi Kecamatan Dolat Rayat tahun 2025: Analisis pemekaran desa, jaringan jalan, dan sumber aliran sungai. *Jurnal Pengabdian Cendekia*, 2(1), 81–87. <https://doi.org/10.71417/jpc.v2i1.87>
- Bruhin, A., Fehr, E., & Schunk, D. (2015). The many faces of human sociality: Uncovering the distribution and stability of social preferences. *Games & Political Behavior EJournal*. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-7240>
- Candra, L. D., & Abdullah, A. (2023). Pengaruh pengetahuan investasi, persepsi risiko, dan literasi keuangan syariah terhadap minat investasi dengan cryptocurrency. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 478–492. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14538](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14538)
- Dharmajaya, A. (2018). Urgensi peran dan fungsi perbankan dalam meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 10(1), 26–37. <https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1059>
- Dzikrullah, A., & Chasanah, U. (2024). Optimalisasi peran koperasi dalam mendukung UMKM: Meningkatkan akses modal, penguasaan teknologi, dan ekspansi pasar. *Investi: Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 648–668. <https://doi.org/10.32806/ivi.v5i1.205>
- Ekwueme, H. U., Ede, M. O., Eze, E. C., Mezieobi, D. I., Aroh, P. N., Oneli, J. O., Nweke, P. O., & Enyi, C. (2023). Impact of occupational health coaching on irrational career

- beliefs and workplace deviant behaviors among school employees: Implications for educational administrative policy. *Medicine*, 102(22), e33685. <https://doi.org/10.1097/md.000000000000033685>
- Fadilah, A. N. (2019). Manajemen risiko investasi pada perbankan syariah di Indonesia. *Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 3(1), 40–48. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.42>
- Ferli, O., Hidayat, T., Riyanti, A. R., Nugrahani, C., & Anggraeni, Y. P. (2024). Peningkatan literasi investasi siswa SMAN 1 Kutasari. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(1), 58–70. <https://doi.org/10.33379/icom.v4i1.3793>
- Ferza, R., & Hamudy, M. (2021). Policy design of the regional and central government for the development of Mandalika SEZ. *CosmoGov*, 6(2), 167. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v6i2.29386>
- Handayani, N., Masyhuri, & Suud. (2023). Preserving ancestral teachings in the modern world: Lessons from Mandalika SEZ. In *Proceedings of the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)* (pp. 567–576). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_62
- Hutauruk, R., Tan, D., Situmeang, A., & Disemadi, H. (2023). Developing an Indonesian regulatory framework in the face of SEZs 5.0. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2). <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.67623>
- Kadir, M. A., Azhari, Hafliyah, T., Sufyan, & Kurniasari, E. (2022). ASEAN guidelines for special economic zones (SEZs) development and collaboration: A study of SEZ Arun Lhokseumawe, Aceh–Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 15(2). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.7820>
- Kongela, S., Mugeta, N. D., & Lucian, C. (2025). Influential factors for effective facilities management practices in public special economic zones (PSEZ): A case study of Benjamin Mkapa and Hifadhi SEZs in Dar es Salaam, Tanzania. *Journal of Facilities Management*. <https://doi.org/10.1108/jfm-07-2024-0087>
- Lestari, S. K., Hindrayani, A., & Sangka, K. B. (2025). Pengaruh literasi keuangan dan literasi digital terhadap kesadaran penipuan investasi pada mahasiswa. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 14(4), 490–510. <https://doi.org/10.24843/eeb.2025.v14.i04.p05>
- Magdalena, F. C. S., Amelinda, R., Anwar, R. M., & Oktavini, E. (2023). Peran financial self-efficacy pada kualitas pembelajaran akuntansi dan keuangan terhadap keputusan investasi. *Jurnal Ekonomi*, 28(3), 367–386. <https://doi.org/10.24912/je.v28i3>

- .1820
- Masrun, M., Wahidin, W., Yuniarti, T., & Firmansyah, M. (2022). Peran Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok terhadap pengembangan ekonomi lokal. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 8(1). <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i1.17>
- Najimudin, M. F., Dahlan, N. H. M., & Nor, M. Z. M. (2023). Developing special economic zones (SEZs) in Malaysia: A land use planning legal perspective. *Planning Malaysia*, 21(25). <https://doi.org/10.21837/pm.v21i25.1244>
- Nazarov, T. (2025). Special economic zone as a land use object. *Russian Journal of Management*.
- Permadi, I. M. A. (2017). Kewenangan badan lingkungan hidup dalam pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(4), 650. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i04.p02>
- Rizkiyah, T. F., & Azzatillah, A. (2023). Produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap penurunan tingkat kemiskinan dengan peran perkembangan UMKM sebagai intervensi. *Jurnal Investasi*, 10(1), 36–43. <https://doi.org/10.31943/investasi.v10i1.314>
- Shafiin, A., Aziz, A. A., Sanurdi, S., & Khotmi, H. (2023). Rasio keuangan terhadap profitabilitas dengan NOM dan GWM sebagai pemoderasi. *Ekuitas: Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah*, 4(4), 1234–1242. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3365>
- Siregar, A. P., Ananda, A. D., Rananda, C. V., & Azzahra, T. P. (2023). Pengaruh literasi keuangan, keamanan, dan kepercayaan mahasiswa terhadap minat investasi online. *Student Research Journal*, 1(3), 393–410. <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v1i3.355>
- Sukuryadi, S., Johari, H. I., Nuryaddin, A., & Putra, A. P. (2025). Pemetaan eksisting ekosistem mangrove wilayah selatan Lombok Tengah pasca pembangunan Sirkuit Mandalika. *Geography: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 13(1), 126–137. <https://doi.org/10.31764/geography.v13i1.30791>
- Supraini, S. (2017). Pengaruh pembiayaan modal kerja dan investasi perbankan syariah terhadap perkembangan UMKM di Provinsi Jambi. *E-Journal Perdagangan Industri dan Moneter*, 4(1). <https://doi.org/10.22437/pim.v4i1.4160>
- Suryade, L., Fauzi, A., Achsani, N., & Anggraini, E. (2021). Towards sustainable development of the Mandalika Special Economic Zone, Central Lombok, Indonesia: Analysis of actors. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 12(6).

[https://doi.org/10.14505//jemt.v12.6\(54\).28](https://doi.org/10.14505//jemt.v12.6(54).28)

Yuliani, N. F. (2017). Analisis sistem dan prosedur pemberian pembiayaan UMKM pada PT PNM Venture Syariah Makassar. *Jurnal Ad'ministrare*, 3(2), 59–70. <https://doi.org/10.26858/ja.v3i2.2565>